

NEWSLETTER

LP3Y Ford Foundation

Surat dari Sekretariat Negara bernomor B-4774 itu menguatkan rencana LP3Y meneruskan program pascagempa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Program yang bertajuk (panjang) “Pelebagaan Partisipasi dan Kebebasan Informasi Publik untuk Menjamin Akses Kelompok Marginal dan Kelompok Perempuan atas Sumber daya Ekonomi dan Kebijakan Publik” berdurasi dua tahun (April 2010-Maret 2012). Pendanaan program didukung Ford Foundation sebesar US\$ 328,267.

Kali ini program di atas dikerjakan LP3Y bekerja bareng ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Pengusaha Kecil) dan IDEA (*Institute for Development and Economic Analysis*). Porsi LP3Y selain sebagai mediator juga berfokus pada pemberdayaan warga bermedia (koran dan radio) bertumpu pada lima desa (Gilangharjo, Mulyodadi, Jambidan, Srihardono dan Wonolelo).

Pada program terdahulu (pemulihan pascagempa) yang dikerjakan LP3Y beserta 11 LSM lain selama setahun (2007-2008) menyasar kepada lima dusun yang ada di desa tersebut di atas. Jadi, program lanjutan ini memperluas cakupan (dari dusun ke desa) dan lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan akses sosial perempuan marjinal. Kalau dulu ada masalah kesehatan dan kesenian sekarang sudah tidak lagi.

Kalau dulu LP3Y mengajak wartawan untuk meliput kegiatan pemulihan gempa, sekarang malah mengajak warga untuk bermedia, khususnya koran dan radio. Kedua media ini

diharapkan tumbuh dan berkembang di tangan warga sendiri, sesuai dengan kebutuhan aktual mereka.

Seusai asesmen warga memilih masing-masing tiga orang yang mewakili desanya untuk mengelola koran dan radio. Setiap satu desa satu radio warga, dan satu koran warga untuk lima desa. Semangat untuk bermedia sangat nampak di awal pertemuan yang dirembug di Bantul. Kerja berat berikutnya adalah menjaga agar semangat itu tetap terjaga selama dua tahun.



Anggota Kolaborasi LP3Y-IDEA-ASPPUK diterima Kepala Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret Bantul, di kantornya.

Luapana semangat yang tumbuh dari warga penting untuk dikelola melalui penahapan prosedur. Misalnya, untuk membangun radio warga dibutuhkan kesepakatan bersama warga (ditunjukkan dengan dukungan minimal 250 orang dengan bukti fotocopy KTP). Lalu membentuk organisasi pengelola radio yang legal (berdasar akte notaris). Kemudian baru mempersiapkan

perangkat fisik dan materi penyiaran yang sesuai dengan kebutuhan warga. Kami tidak ingin: “Pokoknya siaran dulu, ijin belakangan”.

Baik koran maupun radio warga diharapkan siap terbit atau siaran pada Oktober 2010. Waktu enam bulan adalah masa pergulatan yang butuh stamina prima. Sikap menggebu-gebu harus bisa dipandu. Inilah masa-masa yang menegangkan.(srs)

ISSN 0853-7402



Cara mendapatkan NEWSLETTER LP3Y: Kirimkan identitas serta nama media Anda, akan kami kirimkan secara gratis. Informasi yang kami muat di NEWSLETTER dapat dikutip atau disiarkan tanpa ijin asal menyebut sumber. Apabila anda memiliki informasi tentang HIV/AIDS yang layak untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas, silakan kirim dan akan kami muat. Anda dapat menghubungi kami ke alamat: LP3Y Jl. Kaliurang Km 13,7 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 55584 atau via telepon dan faksimili No. (0274)896016, email: lp3y@idola.net.id dan situs <http://www.lp3y.org>

Penanggung Jawab : Ashadi Siregar Pimpro/Pemimpin Redaksi : Slamet Riyadi Sabrawi Staf Redaksi : Ismay Prihastuti, Masduki, Rondang Pasaribu, Agoes Widhartono, Dedi H Purwadi Sekretaris Redaksi : W. Nurcahyo



MENGAJAK WARGA BERMEDIA

Dari Workshop Warga Bermedia

PAGI itu, tepatnya Rabu 19 Mei 2010, suasana di salah satu tempat di Rumah Makan Numani, jalan Parangtritis, Yogyakarta tampak ramai. Itulah hari pertama Workshop Warga Bermedia yang diselenggarakan LP3Y, dalam mengawali kegiatan program Kolaborasi LP3Y-IDEA ASPPUK.

Workshop ini mengundang warga yang berasal dari lima desa yakni Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan, Desa Wonolelo Kecamatan Pleret, Desa Srihardono Kecamatan Pundong, Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak, dan Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro. Kesemua desa tersebut berada di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Dua hari lamanya workshop ini berlangsung, 19-20 Mei. Selain dihadiri peserta workshop, hadir juga wakil dari IDEA (*Institute for Development and Economic Analysis*), Henindya Wisnuadji serta Retno Kustati dari ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil). Pada kesempatan itu mereka juga turut memaparkan secara garis besar tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama program ini berlangsung, dua tahun ke depan.

Semula peserta yang diharapkan hadir berjumlah 30 orang yakni 15 orang peserta mewakili koran warga dan 15 peserta untuk radio komunitas (rakom). Namun pada hari pertama, para peserta tidak semuanya hadir. Peserta media cetak atau koran warga hanya berjumlah 12 orang, sedangkan radio komunitas 14 orang.

Hari pertama, acara dimulai dengan pengantar oleh Slamet Riyadi, selaku *project officer*. Selain pengantar dan pengenalan terhadap program baru ini, Slamet Riyadi juga memaparkan program LP3Y yang akan dilakukan selama dua tahun mendatang. Selanjutnya, sesi pengenalan program, IDEA dan ASPPUK diwakili oleh Henindya Wisnuadji dan Retno Kustati secara singkat memaparkan rencana kegiatan dan peran serta lembaganya.

Setelah rehat, pemberian materi tentang pengenalan jurnalistik dimulai. Ashadi Siregar selaku Direktur LP3Y menyampaikan secara umum tentang teknik dasar Jurnalistik. Sedangkan Agoes Widhartono (staf LP3Y) memaparkan secara singkat tentang “Apa itu Koran Warga”. Materi tentang “Apa itu Radio Warga” disampaikan oleh Ibnu Sumarmo, ketua SIAR (Saluran Informasi Akar Rumput) dan pengelola

JRKY (Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta dan radio komunitas Malioboro).

Sesi pengenalan film dokumenter juga disampaikan oleh Rabernir (pembuat film dokumen indie). Secara khusus, sesi pengenalan film dokumenter ini disampaikan dengan tujuan, jika ada di antara peserta yang tertarik untuk membuat film, pembicara akan membantu untuk mendampingi pembuatannya. Alasannya

karena film dokumenter merupakan salah satu bentuk media warga, yang dapat dibuat oleh warga dan tentang komunitas warga itu sendiri.

Media warga

Media warga yang diusung melalui workshop ini dikenalkan dalam beberapa berbentuk. Dalam bentuk cetak seperti biasa disebut koran warga (*community newspaper*), dapat juga berbetuk suara (elektronik) seperti radio komunitas dan dapat juga berupa audi visual, seperti halnya film dokumenter.

Meskipun berbeda bentuk, media warga mempunyai ciri yang sama yakni dari, oleh, dan untuk warga. Maksudnya, media warga dikerjakan oleh warga, faktanya diambil dari kehidupan sosial warga. Media warga juga tidak berorientasi mencari laba. Biasanya media warga ini sangat terbatas daya jangkauannya.

Membuat koran warga memang tidak mudah. Seperti yang disampaikan Agoes Widhartono, koran warga dibentuk



Ashadi Siregar saat memberikan materi Pengenalan Jurnalistik Dasar untuk peserta pelatihan.



Dapur Info

dari teks kuat untuk sebuah visi perubahan sosial. Jika tidak, mungkin saja koran warga akan terbit beberapa kali saja dan bahkan berhenti total karena bosan dan atau kehabisan tenaga baik daya maupun dana.

Selain itu Agoes juga mengatakan bahwa membuat koran warga memang banyak tantangannya. Hal ini disebabkan karena ada beberapa yang dibutuhkan seperti misalnya; butuh keterampilan menulis, butuh pengorganisasian dan proses (pencetakan dan pendistribusian). Namun koran warga juga punya kelebihan karena dikerjakan oleh tim, dan tidak individual.

Sedangkan untuk radio komunitas (rakom) hampir sama, sebagai media warga tentu rakom juga butuh perangkat teknis seperti halnya media cetak. Selain butuh alat seperti berdirinya menara dan perangkat komputer sederhana untuk siaran, rakom juga butuh keterampilan siaran seperti halnya jurnalis radio yang sering menyampaikan beritanya di radio komersil.

Jika koran warga dapat saja dengan mudah terbit tanpa ada proses ijin yang harus dipenuhi, lain halnya dengan rakom. Proses atau prosedur pendirian rakom harus memenuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah, sesuai dengan PP No. 51/2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

Dalam tata cara dan persyaratan perizinan meliputi: a) persyaratan administrasi antara lain berisi tentang tujuan pendirian serta nama, visi, misi dan format siaran yang akan diselenggarakan serta susunan nama para pengurus penyelenggaraan penyiaran. b) program siaran yang meliputi uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata acara siaran dan khalayak siaran dan c) data teknik penyiaran yang meliputi daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun penyiaran serta usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan.

Itulah kiranya tentang dua media warga yang akan diselenggarakan di lima desa. LP3Y akan mengadvokasi pembentukan kedua jenis media warga itu di lima desa tersebut. Media cetak atau koran warga akan dibuat oleh gabungan dari lima warga desa yang ditunjuk untuk membuat satu koran

warga. Sedangkan rakom diharapkan di tiap-tiap desa akan berdiri. Bagi desa yang sudah terbentuk rakomnya, LP3Y akan mengadvokasi untuk proses perizinan dengan dibantu KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Yogyakarta.

Rencana tindak lanjut

Pada hari kedua peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok media cetak difasilitatori oleh Dedi Purwadi dan Rondang Pasaribu. Sedangkan kelompok Radio Komunitas didampingi oleh Agoes Widhartono dan Ibnu Sumarmo.

Para peserta diajak untuk membahas apa saja yang dibutuhkan jika ingin membuar media warga. Dari diskusi dengan para peserta diharapkan tergalikan kebutuhan bersama untuk membuat media warga tersebut.

Dari hasil diskusi yang dilakukan kelompok koran warga teridentifikasi beberapa kebutuhan misalnya, kebutuhan infrastruktur yang meliputi; komputer, kamera, recorder, printer dan flash disk.

Sedangkan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia antara lain teknik mencari informasi dan teknik wawancara, operasional komputer, menulis berita, cara menulis artikel, cara menata berita, penyuntingan dan organisasi penerbitan.

Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut di atas akan diselenggarakannya pelatihan sesuai kebutuhan yang teridentifikasi. Dari hasil diskusi kelompok koran warga akan bertemu kembali pada Sabtu, 5 Juni mendatang untuk melakukan pelatihan jurnalistik di kampus LP3Y.

Sedangkan untuk kelompok radio komunitas, rencana pertemuan berikutnya pada Kamis, 3 Juni 2010 dengan membahas tentang mekanisme perizinan rakom dengan mengundang KPID. Adapun tujuan mengundang KPID Yogyakarta dimaksudkan untuk mengetahui sesungguhnya prosedur perizinan yang benar. Karena selama ini banyak rakom yang telah mengudara tapi belum selesai mengurus perizinan yang dianggap "sulit" dan berbelit bagi pengurus rakom.



Salah satu kelompok media warga saat berdiskusi menyusun rencana tindak lanjut



PEMILUKADA DI DIY 2010

Sukar Mengenali Calon Lewat Surat kabar

PEMILUKADA (Pemilihan Umum Kepala Daerah) di tiga kabupaten Provinsi DI Yogyakarta, yaitu Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman, yang diselenggarakan serempak 23 Mei 2010, telah usai.

Meski ada pengamat yang menyatakan pemilukada di ketiga kabupaten tersebut kurang greget (Lihat tulisan Bambang Purwoko, *Pemilukada Tanpa Greget, Kedaulatan Rakyat*, 21 Mei 2010, hal. 1), toh para pemilih yang datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) telah menjatuhkan pilihan.

Beragam alasan pemilih memberikan suara kepada calon bupati/calon wakil bupati (cabup/cawabup) tertentu. Apapun alasan pemilih, paling tidak mereka telah menggunakan hak politiknya secara aktif dalam proses demokrasi.

Secara ideal, pemilih seyogyanya menjatuhkan pilihan secara cerdas dan rasional. Untuk itu, pemilih memerlukan informasi lengkap mengenai sosok setiap calon, sehingga tidak semata-mata terpicat oleh nama tenar, partai serta kelompok masyarakat yang mendukung calon tersebut, visi dan misi serta program yang akan dijalankan, dan lain-lain.

Salah satu sumber informasi yang mestinya bisa diandalkan adalah surat kabar. Surat kabar diharapkan bisa menyajikan informasi yang lengkap dan obyektif tentang sosok setiap calon. Di situlah peran surat kabar sebagai institusi pers yang seyogyanya netral, diyakini mampu mendorong proses demokratisasi kehidupan politik (lihat, *Menuju Masyarakat Kewargaan*, LP3Y, 1999).

Sehubungan dengan itu, muncul pertanyaan: Apakah surat kabar menjadi sumber informasi terandalkan bagi para pemilih untuk lebih mengenal sosok calon kepala daerah?

Kepedulian Instan

Sosok setiap calon penting diketahui setiap pemilih sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pilihan, antara lain apakah calon mempunyai kemampuan, jujur, adil, berpihak kepada rakyat, tidak korupsi, dan sebagainya. Pengetahuan semacam ini, yang bisa dibaca melalui rekam jejak (*track record*) setiap calon, menjadi informasi pembandingan untuk mengkritisi isi kampanye setiap calon biasanya hanya berisi hal-hal yang baik, janji yang enak didengar, angin surga.

Ambil sebagai misal, semasa kampanye, ada calon yang berjanji akan lebih memerhatikan kaum difabel, atau meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama bagi rakyat kecil, dan sebagainya. Bagi pemilih kritis, janji seperti itu jelas tidak akan dipercaya begitu saja. Sederet keraguan akan

terbersit di benak masing-masing, antara lain: Apa jaminan bahwa janji itu akan dipenuhi? Mengapa yang bersangkutan peduli terhadap kaum difabel, peduli atas mutu pelayanan kesehatan bagi rakyat kecil? Apakah kepedulian itu sudah ada sejak lama, yang bisa dibaca pada rekam jejak (*track record*)? Jangan-jangan kepedulian itu muncul secara instan, hanya demi kepentingan meraih suara. Atau terpaksa peduli karena digiring menandatangani kontrak politik, suatu kecenderungan yang marak belakangan ini.

Dengan kata lain, adanya keraguan atas kepedulian instan para calon menyebabkan pemilih memerlukan informasi lengkap tentang sosok setiap calon. Informasi yang lebih lengkap tentang sosok setiap calon bisa menjadi dasar untuk menilai secara kritis apakah terdapat kesesuaian antara perbuatan dan janji-janji yang diumbar selama masa kampanye.

Dalam konteks itu, maka pernyataan Suryatiningsih Budi Lestari, anggota KPUD Sleman, yang dilontarkan seusai sosialisasi pemilukada terhadap kaum difabel, menarik disimak. Menurut Suryatiningsih, banyak kaum difabel belum mengenal secara baik cabup/cawabup dalam pemilukada di Sleman (*Kedaulatan Rakyat*, 11 Mei 2010, hal. 4).

Pernyataan tersebut kiranya tidak hanya berlaku bagi kaum difabel. Boleh jadi banyak pemilih lain yang bukan difabel juga mengalami hal yang sama, yakni belum mengenal secara baik sosok cabup/cawabup yang menjadi kontestan dalam pemilukada. Ini sesuai dengan pendapat Bambang Purwoko yang disampaikan dalam tulisannya yang telah disebut di atas. Dikemukakan, salah satu penyebab pemilukada kurang greget adalah karena banyak cabup/cawabup baru didengar namanya setelah resmi menjadi calon. Wajah para calon juga cuma dikenal melalui baliho atau poster. Mereka tiba-tiba saja muncul menjadi cabup/cawabup.

Pemilih yang belum mengenal sosok cabup/cawabup jelas bisa ditemukan di tiga kabupaten – Bantul, Gunung Kidul, Sleman – di mana Pemilukada 2010 diselenggarakan. Mereka adalah pemilih bebas dalam pengertian tidak terikat pada partai, ideologi, atau kelompok pendukung cabup/cawabup tertentu. Mereka inilah yang memerlukan informasi dimaksud.

Sudah tentu para pemilih tidak harus mencari sendiri informasi tersebut. Tanpa harus menjadi corong cabup/cawabup tertentu, surat kabar sebenarnya bisa menyajikan informasi yang lengkap dan obyektif tentang sosok setiap calon.



Analisis Info

2. Berita yang memuat informasi tentang visi, misi, program setiap calon.
3. Berita yang menginformasikan partai atau kelompok masyarakat pendukung.

Informasi Minim

Berdasarkan pengamatan, halaman khusus Pemilu 2010 Hari *Kedaulatan Rakyat* terbitan 1 – 23 Mei 2010 memuat 49 item berita yang termasuk ketiga kategori di atas, dengan rincian sebagai berikut:

Kabupaten daerah pemilihan cabup/cawabup	Kategori isi berita		
	Sosok	Visi, Misi, Program	Partai dan Kelompok Pendukung
Sleman	2	21	2
Gunung Kidul	1	11	1
Bantul	0	8	3

Mengacu hasil pengamatan di atas, ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, berita mengenai sosok setiap cabup/cawabup yang menjadi kontestan di setiap kabupaten sangat minim. Tiga berita tentang sosok cabup/cawabup di dua kabupaten hanya tentang kekayaan cabup/cawabup di kabupaten tersebut.

Kedua, berita tentang visi, misi, dan program yang disampaikan para cabup/cawabup memperoleh porsi terbanyak. Artinya, isi berita yang termasuk kategori ini pada dasarnya hanya meneruskan apa yang disampaikan para calon kepada pemilih melalui kegiatan kampanye.

Dengan kata lain, jika diharapkan pada halaman khusus Pemilu 2010 Hari *Kedaulatan Rakyat* terbitan tanggal 1 – 23 Mei 2010, akan ditemukan laporan jurnalis yang menggambarkan secara lengkap dan obyektif sosok setiap cabup/cawabup di tiga kabupaten, harapan itu tidak terpenuhi.

Sudah tentu terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa hasil pengamatan di atas mencerminkan kecenderungan pemberitaan surat kabar tentang Pemilu 2010 di tiga kabupaten Provinsi DI Yogyakarta. Agar sampai kepada kesimpulan seperti itu, masih perlu pengamatan lebih menyeluruh dengan mengamati pula surat kabar lain yang sama-sama terbit di Yogyakarta serta beredar di tiga kabupaten di mana Pemilu 2010 diselenggarakan.

Tapi hasil pengamatan di atas setidaknya mengisyaratkan bahwa laporan mengenai sosok calon memang perlu lebih banyak disajikan surat kabar. Dengan laporan semacam itu, surat kabar secara ideal diharapkan bisa membantu pembaca menjadi pemilih yang cerdas dan rasional dalam pemilu. (*rondang pasaribu*)

Sosok dalam Berita

Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana dikemukakan di atas, dilakukan pengamatan terhadap pemberitaan Hari *Kedaulatan Rakyat*, terbitan tanggal 1 – 23 Mei 2010. Ada beberapa alasan mengapa untuk keperluan tulisan ini hanya Hari *Kedaulatan Rakyat* yang diamati.

Pertama, hasil pengamatan yang dijadikan titik tolak penyusunan tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membandingkan perbedaan antar surat kabar dalam memberitakan pemilu di ketiga kabupaten yang telah disebutkan, yaitu Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman. Seperti diketahui, ada tiga surat kabar terbitan Yogyakarta yang beredar di Provinsi DI Yogyakarta, termasuk *Kedaulatan Rakyat*. Bahwa hanya Hari *Kedaulatan Rakyat* yang diamati, lebih dilandasi pertimbangan subyektif untuk menemukan kasus yang menjadi dasar pengembangan gagasan yang disampaikan melalui tulisan ini.

Kedua, pemilu di tiga kabupaten tersebut diselenggarakan saat bersamaan, yaitu tanggal 23 Mei 2010. Masa kampanye terbuka berlangsung 6 – 19 Mei 2010. Maka, rentang waktu tanggal 1 – 23 Mei 2010 kiranya memberi keleluasaan yang memadai bagi surat kabar seperti *Kedaulatan Rakyat* untuk menyajikan laporan tentang sosok cabup/cawabup di ketiga daerah pemilu.

Ketiga, sebelum masa kampanye terbuka dimulai, *Kedaulatan Rakyat* sudah menyediakan satu halaman khusus (halaman 4) bertajuk Pemilu 2010, memuat berita tentang berbagai hal menyangkut pemilu di ketiga kabupaten dimaksud. Jadi, pada satu halaman dimaksud, sekaligus bisa dibaca berita tentang pemilu di Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul.

Keempat, halaman khusus Pemilu 2010 pada Hari *Kedaulatan Rakyat* memuat berita dengan topik beragam tentang pemilu di tiga kabupaten, semisal kegiatan KPUD, diskusi yang diikuti berbagai kalangan terkait pemilu, kegiatan maupun isi kampanye cabup/cawabup, dan lain-lain. Karena itu, mengingat di Bantul tiga pasangan, di Gunung Kidul empat pasangan, sedang di Kabupaten Sleman ada tujuh pasangan cabup/cawabup, menarik diamati apakah halaman khusus Pemilu 2010 surat kabar ini memberi ruang yang cukup untuk memperkenalkan sosok setiap cabup/cawabup di setiap kabupaten.

Adapun yang diamati adalah berita terkait setiap cabup/cawabup yang menjadi kontestan di tiga kabupaten, yang dibedakan berdasarkan kategori isi sebagai berikut:

1. Berita yang memuat informasi mengenai sosok setiap calon, menyangkut latar belakang pendidikan, karir, kekayaan, kemampuan profesional, reputasi, karakter, dan lain-lain.



MENILIK LEBIH JAUH UJIAN NASIONAL

BERITA tentang Jumlah sekolah yang tidak lulus 100% Ujian Nasional (UN) 267 (1,62 %) dari total 16.467 sekolah menjadi pembicaraan hangat. Nuansa kepedihan dari siswa yang tidak lulus tergambar dengan jelas di media baik televisi maupun surat kabar.

Dalam laporannya, media mendeskripsikan daerah atau provinsi yang menempati peringkat pertama paling banyak ketidakkulusannya adalah Kalimantan Timur sebanyak 39 sekolah atau 1.158 siswa. Sedangkan Jakarta ada 10 sekolah dengan jumlah peserta 143 siswa dengan tingkat kelulusan 0%. (www.republika.co.id)

Meski demikian fakta berbicara tentang UN, namun Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh mengatakan bahwa pemerintah tidak akan meniadakan UN. Menurut Nuh adanya ketidakkulusan siswa ini bukan merupakan kegagalan, dan pemerintah akan mengintervensi pada permasalahan di atas, pada provinsi, sekolah, atau mata pelajaran yang paling banyak tidak lulus.

Menindaklanjuti persoalan UN ini, setidaknya ada dua hal yang dapat digaribawahi. Pertama, pernyataan Mendiknas yang akan tetap melaksanakan UN. Kedua, banyak pihak yang menolak atas penyelenggaraan UN ini.

Persoalan ini memang tidak sederhana. Dari fakta yang disampaikan oleh media massa, banyak kesan seolah UN ini dipaksakan. Lihatlah dampak yang ditimbulkan akibat siswa gagal dalam UN. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana kebijakan tidak memikirkan dampak psikologis, karena siswa dianggap sebagai objek bukan subjek.

Mengapa objek? Pemerintah memperlakukan siswa dengan mengujinya melalui soal-soal UN yang dianggap standar tanpa ada evaluasi komprehensif dari seluruh pihak terkait. Jika siswa diperlakukan sebagai subjek, maka bukan sekadar angka mata pelajaran tertentu yang dinilai, tapi juga mempertimbangkan kemampuan lainnya yang banyak siswa punya nilai lebih unggul. Seperti misalnya, melukis, seni musik, dan lain sebagainya.

Di sisi lain juga masih timbul pertanyaan, apakah penyelenggaraan UN telah berpegang pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)? Dalam putusan MK dinyatakan bahwa pemerintah boleh menyelenggarakan UN asal meningkatkan mutu pendidikan.

Apakah mutu pendidikan yang dimaksud dalam putusan MK telah dipenuhi pemerintah? Pertanyaan-pertanyaan itu akan terus menggelinding dengan adanya fakta di lapangan

tentang sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Seperti misalnya, apakah kondisi sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia sudah memadai? Tidak terkecuali sekolah yang berada di pelosok-pelosok pedalaman.

Bagaimana dengan fasilitas, guru, sarana pendukung lainnya baik itu bangunan, buku, dan lainnya, apa sudah terpenuhi dengan baik?

Salah satu unsur dalam ketidakkulusan ini turut dipertanyakan kualitas atau mutu guru. Apakah siswa telah mampu menganalisis atau menerima apa yang diajarkan oleh guru? Jangan-jangan siswa hanyalah sebagai objek dari cara pengajaran guru. Ironinya guru yang mengajar tersebut sesungguhnya tidak memenuhi kualitas yang baik atau malah di bawah standar.

Hal lain yang mungkin belum terpikirkan adalah sekolah di daerah bencana. Indonesia diketahui berpotensi terkena bencana. Selain itu karena kondisi alam dan ulah manusia, saat ini banyak daerah yang rawan bencana seperti tanah longsor dan banjir. Padahal daerah yang terkena bencana dapat berdampak pada kegiatan lainnya termasuk belajar mengajar. Tidak sedikit berita tentang akibat bencana ini aktivitas belajar mengajar terganggu, sekolah diliburkan.

Lebih jauh melihat persoalan ini tentu dengan jelas terlihat, tidak mudah membuat standar yang sama di satu daerah tertentu dengan daerah lain. Kendala-kendala tersebut perlu juga dipertimbangkan untuk mencapai atau menyamakan angka standar nasional.

Sikap kritis

Pihak pemerintah tetap mempertahankan penyelenggaraan UN ini karena menganggap telah memenuhi atau meningkatkan mutu pendidikan tanpa ada evaluasi dan melihat secara riil kondisi di lapangan. Padahal jika dilihat faktanya banyak guru mengakui bahwa banyaknya siswa yang tidak lulus disebabkan keterbatasan fasilitas yang dimiliki sekolah.

Seperti contohnya, kendala mengapa siswanya tak lulus pada mata pelajaran bahasa Inggris. Kurangnya pelatihan *listening* yang diberikan, membuat mereka tak bisa menjawab soal saat materi *listening* diujikan. "Mau bagaimana lagi, kondisi kami memang seperti ini. Sangat minim fasilitas," ujar Niken, Kepala SMA Mangunkarsa, Sampangan, Semarang, Jawa Tengah (www.suaramerdeka.com, 28/4/10)

Di sisi lain, dalam laporan surat kabar Harian *Media*



Spesial Info

Indonesia, edisi 5/1/10 menyebutkan bahwa ada puluhan ribu kelas tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di seluruh Indonesia. Di antaranya ada 60 bangunan sekolah di Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Penyebabnya adalah keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana sekolah.

Sedangkan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebanyak 2.195 ruang kelas Sekolah Dasar (SD) kini juga dalam kondisi rusak. Ruang kelas yang rusak cukup berbahaya bagi siswa terutama di musim penghujan.

Dari sebagian fakta yang digambarkan oleh surat kabar tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan di negara ini, tampaknya mempertahankan UN dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah/negara perlu dipertimbangkan kembali.

Sikap kritis yang dibutuhkan untuk melihat persoalan yang ada dengan melihat kondisi lain selain fisik; bangunan yang tidak memadai atau sarana dan prasarana penunjang pendidikan seperti salah satu contoh yang disinggung di atas tentang lab bahasa untuk program studi bahasa, tidak semuanya sekolah memiliki fasilitas itu.

Selain itu juga dilihat sisi lain tentang siswa yang akan menghadapi UN. Siswa yang kebetulan orangtuanya mampu ikut bimbingan belajar dengan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan usaha dari pihak sekolah dalam mempersiapkan UN ini, guru memberikan pelajaran tambahan. Semua itu dilakukan untuk menunjang angka yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari gambaran tersebut di atas usaha mencapai nilai yang ditentukan oleh pemerintah akan mata pelajaran yang diujikan menjadi tanda tanya, apakah sekadar itu untuk mengukur kemampuan siswa? Tidak adakah unsur lain yang tidak hanya sekadar mengejar angka yang ditentukan.

Kemampuan analisis juga menjadi penting karena kemampuan analisis anak atau siswa bisa dilihat dengan kemampuannya mempresentasikan ide dan melaksanakan ide-ide itu. Apakah dunia pendidikan di Indonesia sudah

mengakomodasi seluruh potensi anak didik untuk bisa seperti itu? Ini juga merupakan satu hal yang perlu mendapat perhatian.

Apa yang disampaikan praktisi pendidikan Elin Driana dalam opininya di surat kabar *Kompas* (4/5/10), tampaknya bisa menjadi bahan refleksi bersama. Janganlah hanya terjebak pada peningkatan nilai rata-rata siswa dari tahun ke tahun ataupun peningkatan angka ketidakhadiran yang dikaitkan dengan kredibilitas pelaksanaan UN.

Sudah saatnya semua pihak dalam hal ini pemerintah atau negara menelaah pengaruh UN lebih jauh dan lebih dalam lagi ke ruang-ruang kelas tempat anak-anak menuntut ilmu. Apakah kebijakan UN mampu menumbuhkan kecintaan siswa pada ilmu pengetahuan, memupuk rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan-kemampuan berpikir tingkat tinggi dan menggali kreativitas?

Pendidikan adalah hak dasar kemanusiaan yang harus dinikmati secara layak oleh setiap warga masyarakat. Bahwa pengertian hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Oleh karena itu Negara sebagai institusi resmi wajib melaksanakannya, memfasilitasi dan meniadakan segala penghalangnya untuk pendidikan yang bermutu.

Adanya standar pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional

yang meliputi standar; isi, proses, kompetensi kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan serta standar penilaian pendidikan usia belajar adalah hak setiap warga yang harus dipenuhi pemerintah. Sebelum semua unsur itu terpenuhi dengan baik, kiranya tidak adil menyelenggarakan pendidikan dengan standar yang masih dikatakan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. (*ismay prihastuti*)

Sambungan dari halaman...3

Motivasi kuat

Pada kesempatan terakhir acara workshoP Warga bermedia ini, Ashadi Siregar selaku Direktur LP3Y menyampaikan beberapa hal yang perlu diingat oleh para peserta, antara lain, bermedia memang bukan pekerjaan sambil lalu. Oleh karena itu dalam perencanaan itu membuat koran warga ataupun radio komunitas, dibutuhkan orang atau anak muda yang bersedia punya motivasi kuat untuk penerbitan.

“Tidak hanya itu, untuk radio komunitas, dari lingkungan warga juga dibutuhkan *stakeholder* yang mendukung kepentingan berdirinya rakom. Hal ini disebabkan karena

rakom membutuhkan pengampu kepentingan, pengelola teknis dan pengelola pendukung. Dapat dibayangkan untuk izin mendirikan rakom dibutuhkan 250 orang pendukung di komunitasnya,” kata Ashadi.

Setiap rakom memang punya sejarah sendiri-sendiri. Namun setidaknya jika rakom sudah berdiri sebaiknya membangun jaringan. Pengajuan izin ke KPID mungkin akan lebih mudah jika sudah terbangun jaringan secara kolektif. Untuk itu menurut Ashadi, kiranya butuh bersama-sama saling mendukung agar media warga dapat terwujud di desa masing-masing. Semoga. (*may*)



Program Kolaborasi LP3Y-IDEA-ASPPUK

RANCANG KEGIATAN UNTUK DUA TAHUN

Pertemuan perdana

RAPAT persiapan dan koordinasi yang dilakukan oleh tiga lembaga dalam Kolaborasi LP3Y-IDEA-ASPPUK untuk Program Pelembagaan Partisipasi dan Kebebasan Informasi Publik untuk Menjamin Akses Kelompok Marginal dan Kelompok Perempuan atas Sumber Daya Ekonomi dan Kebijakan Publik di Bantul, Yogyakarta sudah berlangsung sejak April lalu.

Dalam pertemuan tersebut ada banyak hal yang perlu didiskusikan dan disepakati bersama. Pembahasan yang melibatkan ketiga lembaga, meliputi perencanaan kegiatan masing-masing lembaga, pembahasan *code of conduct* dan mekanisme kolaborasi, *timeline* dan lain sebagainya.

Pada pertemuan awal atau rapat perdana yang berlangsung pada Senin, 12 April 2010 di ruang pertemuan LP3Y, ada beberapa hal yang didiskusikan. Paling tidak sebagai persiapan mulai diketahui sebagian kecil, apa saja yang perlu diketahui antarlembaga selama program berlangsung kelak.

Sebelum membahas tentang kebutuhan apa saja, pertemuan yang berlangsung sejak pagi hingga sore dimulai dengan pemaparan secara garis besar kegiatan yang akan dilakukan selama 24 bulan.

Pembahasan dimulai oleh IDEA (*Institute for Development and Economic Analysis*) yang memaparkan tentang kegiatannya. Pada level sistem kebijakan IDEA akan melakukan aktivitas *Legal drafting* Perda Partisipasi dan Kebebasan Informasi Publik, Peningkatan Alokasi Anggaran untuk Kelompok Marginal, dan Perbaikan indikator APBD yang pro *poor* dan sensitif gender.

Sedangkan pada level advokasi prosedur kebijakan IDEA masih melakukan perbaikan partisipasi dalam prosedur MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), peningkatan partisipasi CBO (*Community Build Organizer*), PUK (Perempuan Usaha Kecil) dan LKP (Lembaga Keuangan Perempuan) di lima kecamatan dalam perencanaan dan penganggaran.

Pada level advokasi penguatan kelembagaan masyarakat sipil, IDEA akan melakukan penguatan JARAK BANTUL, Penguatan JARPUK (Jaringan Perempuan Usaha Kecil) Bantul, Pendirian LKS Bantul, Penguatan LKP-LKP di Bantul.

Selanjutnya, untuk pengorganisasian dan peningkatan kapasitas untuk advokasi anggaran, dilakukan IDEA pada level peningkatan kapasitas CBO, PUK, dan LKP.

Program yang dilakukan antarlembaga memang ada yang beririsan, namun sebelum membahas program apa saja yang beririsan atau berkolaborasi tersebut, dapat dilihat rencana kegiatan yang akan dilakukan ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil)

Pada level advokasi sistem kebijakan, ASPPUK melakukan kegiatan *legal drafting* Perda Partisipasi dan Kebebasan Informasi Publik, peningkatan alokasi anggaran untuk kelompok marginal dan perbaikan kebijakan publik untuk untuk PUK dan LKP.

Sedangkan pada level Advokasi Prosedur Kebijakan, ASPPUK hanya akan melakukan peningkatan partisipasi CBO, PUK dan LKP di lima kecamatan dalam perencanaan dan penganggaran. Dan pada level Advokasi penguatan kelembagaan masyarakat sipil ASPPUK akan melakukan Penguatan JARPUK Bantul, Pendirian LKS Bantul, dan Penguatan LKP-LKP di Bantul.

Selanjutnya, pada level peningkatan kapasitas CBO, PUK, dan LKP ASPPUK akan melakukan kegiatan pengorganisasian dan peningkatan kapasitas untuk PUK dan LKP. Untuk LP3Y, pada advokasi sistem kebijakan akan sama-sama dalam *legal drafting* Perda Partisipasi dan kebebasan Informasi Publik. Selanjutnya, dalam level kerja pendukung advokasi, kegiatan *intermediary* untuk multipihak terkait program, kampanye media terintegrasi, pendokumentasian *lesson learnt*, serta sekaligus pelaporan dan administrasi.

Itulah kira-kira gambaran singkat tentang program kegiatan yang akan dilakukan selama dua tahun ke depan. Untuk lebih jelasnya, pada pertemuan berikutnya setiap lembaga akan mem-*break down* kegiatan-kegiatan lebih rinci agar lebih jelas antar sesama lembaga.

Kebutuhan bersama

Pertemuan perdana tersebut dihadiri oleh *Project Officer* masing-masing Lembaga. LP3Y diwakili oleh Slamet Riyadi, IDEA diwakili oleh Henindya Wisnuadje dan ASPPUK diwakili oleh RetnoKustati.

Selain itu, hadir juga *Field Officer* ASPPUK yakni Sarni serta bagian keuangan masing-masing lembaga, LP3Y diwakili oleh Susiani dan Ida Ismawati, IDEA diwakili oleh Lucky dan Tiem serta ASPPUK diwakili oleh Siwi.

Tak ketinggalan staf Profesional LP3Y juga hadir pada pertemuan tersebut yakni Agoes Widhartono, Dedi H. Purwadi,



Info Kolaborasi

Ismay Prihastuti dan Rondang Pasaribu. Mereka juga akan terlibat dalam program ini terutama dalam memproses warga bermedia.

Diskusi pada pertemuan tersebut membahas tentang kebutuhan apa saja pada masa koordinasi persiapan bulan ini. Akhirnya terangkumlah beberapa kebutuhan yang dianggap perlu didiskusikan lebih lanjut, yakni sebagai berikut: 1. Penyepakatan gambaran sinergi ketiga lembaga (LP3Y-IDEA-ASPPUK), 2. Sistem koordinasi, 3. Timeline bersama, 4. Revisi dan pembuatan code of conduct, 5. Sistem keuangan, 6. Sistem pelaporan dan 7. Evaluasi.

Padapertemuankoordinasipersiapaninijugadirencanakan pertemuan-pertemuan berikutnya yakni pada tanggal 19 April mendatang akan membahas timeline bersama,

Selanjutnya akan ada *audience* Desa, atau sosialisasi program kepada aparat-aparat desa. Sosialisasi program kepada aparat desa ini juga merupakan bentuk *kula nuwun* lembaga kepada lima desa yang dilibatkan dalam program ini. Warga di lima desa yakni Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan, Desa Wonolelo Kecamatan Pleret, Desa Srihardono Kecamatan Pundong, Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak, dan Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro. Kelima desa nantinya akan menjadi bagian program ini.

Pertemuan perdana ini juga menghasilkan revisi sebagian *code of conduct* dan mekanisme program ini. Mengapa revisi? Karena program ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari Program Integratif Recovery Pascagempa Bantul yang berlangsung pada 2007-2008 lalu. Namun kali ini program tidak lagi berkegiatan dalam lingkup dusun melainkan desa dan melibatkan lima desa di lima kecamatan berbeda.

Pembahasan *code of conduct* ini lebih mudah karena sebagian aturan banyak yang masih relevan dijalankan. Sedangkan yang sudah tidak relevan aturan tersebut dapat diganti dan selanjutnya dibuat yang baru sesuai dengan kesepakatan antarlembaga.

Penyusunan *code of conduct*

Jika melihat secara sepintas tentang penyusunan code of conduct ini memang masih banyak yang perlu dibahas. Selain membahas tata kerja dan hubungan, juga dibahas mekanisme yang meliputi pengumpulan laporan masing-masing lembaga. Meskipun saat ini lebih sedikit lembaga yang terlibat, bukan berarti persoalan juga lebih sedikit. Untuk itu perlu di diskusikan apa saja yang menjadi program bersama yang beririsan, sehingga nantinya ketika mengadakan acara tidak terjadi saling berbenturan satu sama lain. Untuk itu *timeline* dibutuhkan untuk mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan dalam jangka waktu sebulan, dua atau tiga bulan mendatang.

Selain itu, dalam *code of conduct* dan mekanisme kolaborasi LP3Y, IDEA dan ASPPUK ini juga dibahas

kesepakatan tentang pertemuan atau rapat yang meliputi; pertemuan antar-anggota Kolaborasi LP3Y-IDEA-ASPPUK, pertemuan antara Kolaborasi LP3Y-IDEA-ASPPUK dengan pemerintah, pertemuan antara anggota Kolaborasi dengan komunitas, dan pertemuan antara anggota kolaborasi dengan Ford Foundation.

Selanjutnya, dalam *code of conduct* dan mekanisme Kolaborasi ini juga dibahas tentang pemberian kompensasi finansial kepada warga komunitas, yang mengatur baik prinsip dan besaran maupun mekanisme pemberian kompensasi finansial tersebut.

Pertemuan kedua

Pertemuan kedua dilakukan antar lembaga kolaborasi yang berlangsung pada 19 April lalu, selain menyelesaikan pembuatan *code of conduct*, juga membahas hal-hal teknis lain yang memudahkan antaranggota kolaborasi saling berhubungan. Untuk itu pada pertemuan kedua pembuatan *mailing list* disepakati dengan alamat kolaborasi bantul@yahoo.com.

Pembahasan rencana tindak lanjut *audience* ke desa tentang surat kepada masing-masing desa sudah diserahkan, tinggal meminta konfirmasi dari masing-masing desa. Setelah diketahui waktu yang tepat maka, ketiga lembaga akan bersama-sama untuk *kula nuwun* atau menyampaikan program-program yang telah disusun.

Dari lima desa yang dikirim surat, baru Desa Wonolelo yang merespons akan kehadiran anggota kolaborasi LP3Y-IDEA-ASPPUK ini. Rencananya, ketiga lembaga kolaborasi akan datang ke Desa Wonolelo pada Kamis, 29 April 2010, pukul 13.00 WIB, di kantor kelurahan desa tersebut.

Itulah gambaran singkat tentang rencana program Kolaborasi LP3Y-IDEA-ASPPUK yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Agenda kegiatan “*kula nuwun*” ke desa

- Jumat, 30 April 2010

Anggota Kolaborasi LP3Y-IDEA-ASPPUK berkunjung ke Desa Mulyodadi, kecamatan Bambanglipuro, Bantul. Para anggota diterima oleh Sekretaris Desa, Slamet HS, dan Kaur (Kepala Urusan) Kesejahteraan Rakyat, Bayu.

- Sabtu, 1 Mei 2010

Anggota Kolaborasi berkunjung ke Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, dan Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret. Para anggota Kolaborasi diterima oleh Kepala Desa.

- Senin, 3 Mei 2010

Anggota Kolaborasi berkunjung ke Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan. Para anggota diterima oleh Kaur Pembangunan, Mujianto. (May)



MEKANISME PENDIRIAN RADIO KOMUNITAS SADEWO FM

BERDIRINYA Radio Komunitas Sadewo FM bermula saat Organisasi Pemuda-Pemudi Gemilang merencanakan program kerja periode 2007/2008. Saat itu terdapat beberapa anggota Gemilang yang menghendaki adanya suasana yang baru dalam tubuh organisasi. Wajah baru itu adalah pengadaan Rakom (Radio Komunitas) yang mana fungsinya dimaksudkan untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan budaya lokal serta media perluasan informasi-informasi di Desa. Sehingga masyarakat tidak lagi *blank* informasi yang sedang berkembang secara aktual dan benar.

Dalam perjalanan mengurus keperluan teknis pendirian Rakom, banyak sekali tanggapan dari masyarakat. Rata-rata tanggapan dari masyarakat adalah kurang setuju manakala radio yang akan didirikan tersebut atas nama radio Organisasi Gemilang yang notabene hanya organisasi tingkat satu kampung saja. Akhirnya tim inti mengadakan rapat lagi secara beruntun.

Tim inti yang terdiri dari 16 orang tersebut berbagi peran untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di delapan kampung di desa Wonolelo. Setiap kampung ditangani oleh dua orang tim inti yang sudah ditunjuk untuk mensosialisasikan gagasan pendirian Rakom. Waktu yang dialokasikan untuk sosialisasi ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama dan melelahkan. Sebab di setiap kampung terdapat lebih dari lima perkumpulan.

Masing-masing tim yang melakukan sosialisasi sekaligus meminta fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan tanda tangan dukungan dari warga Wonolelo. Pengumpulan fotokopi KTP ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban manakala nantinya akan mengurus ijin siaran. Setelah panitia mendapatkan cukup banyak dukungan dari masyarakat, panitia menggelar *hearing public* dengan melibatkan perwakilan dari delapan kampung, pemerintah desa, dan calon donatur.

Donatur program adalah Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan Yogya (LP3Y), Plan Indonesia dan Forum Warga Bantul yang menjadi pemandu program. Saat *hearing public*, panitia mempresentasikan gagasan pendirian Rakom. Lobi-lobi intensif terus dilakukan oleh panitia kepada para donatur, bahkan bersama LP3Y para tim inti mengadakan pelatihan teknis operasi *hard ware* dan pengelolaan program.

Kemudian panitia inti mengadakan rapat besar untuk pembentukan Organisasi Radio Resmi milik Desa Wonolelo. Agenda rapat ini adalah pemilihan secara langsung pengurus Sadewo dan pembuatan AD/ART rakom. Adapun pengurus rakom Sadewo ini terdiri dari tim DPK dan tim BPPK.

Setelah pengurus harian Rakom terbentuk, selanjutnya pengurus ini bertugas melobi kembali secara lebih intensif agar proposal pengajuan peralatan kepenyiaran segera dapat dicairkan. Selang beberapa lama dan berbagai proses yang cukup rumit akhirnya pengurus berhasil mendapatkan *support* dana untuk pengadaan peralatan radio komunitas. Dengan memanfaatkan dana tersebut, pengurus rakom berbagi tugas untuk membeli peralatan dan juga ada tim khusus yang bekerja untuk membuat studio. Tempat yang dijadikan studio Sadewo ini masih berstatus pinjaman dari warga.

Sebagian pengurus yang lain mengurus Badan Hukum. Dalam hal pengurusan ini, dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan Akta Notaris adalah :

- a) Berita acara rapat pembentukan AD / ART
- b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Rakom
- c) Foto kopi KTP DPK dan BPPK
- d) Tanda tangan DPK dan BPPK dengan disertai materai 6.000

Selanjutnya pengurus yang lain bertugas untuk menjangkau usulan warga tentang *content* atau program kepenyiaran. Selain itu pengurus ini bertugas untuk mencari *volunter* untuk bersedia bersiaran.

Perjalanan pendirian radio komunitas Sadewo ini dari perencanaan sampai dengan benar-benar terwujud membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun. Pada tanggal 8 Agustus 2008 Sadewo Fm diresmikan oleh pengurus dengan menggelar dialog publik dan pentas seni. Perjuangan pendirian rakom ini tidaklah mudah namun kunci berhasilnya program ini adalah haruslah ada orang-orang yang ikhlas untuk mengawal dan mengurus segala kebutuhan rakom. (*Tim Sadewo*)

Alamat Rakom Sadewo FM

Jl Pogog km 1 Melikan Wonolelo Pleret Bantul Yogyakarta 55791 telp (085743551232 / 0274 8234 204).



MELIPUT BENCANA, MEMBUAT BENCANA

KALAU Anda mencari buku tentang liputan bencana yang ditulis secara jujur, terutama tentang bagaimana media dan para jurnalisnya melihat bencana dan memperlakukan korban bencana, karya Ahmad Arif ini layak menjadi pilihan.

Meliput dan memberitakan peristiwa bencana, terlebih lagi bencana besar dengan kehancuran masif dan ribuan mayat berserakan serta berbagai masalah ikutannya, bukan perkara mudah. Akan tetapi, lebih sulit lagi menyampaikan berbagai fakta tersembunyi di seputar peristiwa bencana secara jujur, apalagi jika fakta-fakta itu menyangkut perilaku para pekerja jurnalis dan media tempat mereka bekerja.

Dalam buku ini, penulis, jurnalis *Harian Kompas* yang pernah ditugaskan meliput bencana tsunami Aceh dan bertugas di daerah tersebut selama sekitar dua tahun, telah berusaha menghadirkan fakta-fakta yang selama ini tak banyak diketahui publik. Fakta-fakta tersebut tak hanya yang berkaitan dengan kondisi bencana (berikut para korbannya), melainkan fakta-fakta mengenai perilaku para jurnalis di lokasi bencana dan bagaimana sesungguhnya media tempat mereka bekerja, termasuk surat kabar tempat penulis bekerja, menyikapi bencana tersebut.

Fakta-fakta mengenai perilaku jurnalis dan sikap media adalah dua hal yang tak banyak diketahui khalayak, khususnya khalayak pembaca maupun pemirsa televisi. Perilaku jurnalis dan media itulah yang kemudian dikemas dalam ungkapan *Bencana Jurnalisme*. Penulis menunjukkan bahwa perilaku tersebut telah turut andil dalam menciptakan “bencana” baru bagi para korban bencana, dalam hal ini korban bencana tsunami di Aceh.

Sungguh tepat catatan yang diberikan Parakitri dalam pengantarnya bahwa buku ini adalah buku yang menegaskan persoalan. Persoalan dalam jurnalisme. Pelaksanaan jurnalisme yang cemar, begitu kata Parakitri. Cemar, dalam arti bahwa



Judul Buku	: Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme: Kesaksian dari Tanah Bencana
Penulis	: Akhmad Arif
Penerbit	: Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
Tahun	: 2010
Halaman	: xxiv + 193 hal

bukan hanya pelaksana yang tidak memadai, tapi juga karena niat buruk (dalam menyikapi situasi bencana dan pascabencana).

Tak mudah menunjukkan ke publik tentang perilaku tersebut. Bagaimanapun juga, ini tak ubahnya membuka borok diri sendiri. Jelas tak semua suka keborokan dirinya diketahui khalayak, apalagi jika kemudian borok itu ternyata membuat orang lain terkena akibatnya.

Borok, cemar, dosa jurnalisme dan media. Itu kata-kata kunci yang dihadirkan penulis melalui buku ini. Keterlambatan merespon peristiwa sebesar bencana tsunami Aceh, pekerja media yang tak memiliki referensi atau bayangan

tentang potensi bencana sebesar Aceh, televisi yang seperti tak menaruh perhatian (dan baru sore hari mulai agak gencar memberitakan setelah televisi luar negeri memberitakan), *vested-interest* media yang sejatinya adalah menjual berita bencana demi laba atau kepentingan korporasi, banyaknya

wartawan yang lari jadi pegawai badan-badan donor demi gaji lalu melupakan persoalan yang seharusnya diliputnya, kolusi jurnalis/media dengan badan-badan kebencanaan yang menutup ruang bagi pemberitaan kebobrokan penanganan pascabencana, adalah sebagian dari borok dan dosa jurnalisme itu yang dipaparkan cukup gamblang. Siapa yang terkena eksesnya? Tak lain para korban bencana.

Ditulis secara memikat dengan gaya penuturan jurnalisme naratif, buku ini pun tak terjebak menjadi sebuah pemaparan kisah peliputan yang ingin menonjolkan sisi keharuan untuk menggugah perasaan. Meski salah satu sisi dari topik utama buku adalah jurnalisme bencana, penulis pun tidak menghidirkannya sebagai sebuah buku teks akademis. Jurnalisme bencana oleh penulis dihadirkan melalui penceritaan berbagai catatan pengalaman liputan, baik menyangkut pengetahuan, sikap dan perilaku jurnalis maupun sikap dan perilaku media. Dalam epilog-nya, penulis merangkum jurnalisme bencana itu dalam sejumlah tips, yang itu pun berdasarkan pengalaman lapangan.* (*dedi*)

Rabu-September-Marinir, Terus Berproses

Namanya singkat, hanya satu kata terdiri delapan huruf: Rabernir. Ya, memang hanya begitu nama lelaki 33 tahun ini. Tapi, apakah arti sebuah nama, demikian kata pujangga Inggris, William Shakespeare, bukan?

“Meski begitu, nama saya ada artinya *lho*,” ujar lulusan Institut Seni Indonesia (ISI) tahun 2007, itu ketika berbincang di ruang audio visual LP3Y, medio April lalu.

Lantas, apakah gerangan arti nama pegiat film dokumenter ini? Ternyata, nama satu suku kata itu adalah akronim yang diberikan ayahnya. Rabernir penggalan tiga kata: rabu, September dan marinir. Benar adanya, nama yang diberikan sang ayah diambil dari beberapa fakta yang, barangkali, memang diharapkan harus senantiasa melekat sebagai penanda bagi anak tunggal pasangan Superman dan Maryati ini. Rabernir lahir pada hari Rabu, 8 September, tahun 1976. Ayahnya adalah seorang prajurit Marinir TNI-AL. Begitulah mula cerita.

Dilahirkan di Desa Kedungweru, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Gombong, sebuah desa di Jawa Tengah bagian selatan, Rabernir tumbuh menjadi lelaki yang selalu gelisah. Kala ia kecil, ayahnya adalah seorang lurah di Kedungweru. Sang ayah, Superman, yang setelah pensiun dari dinas militer Marinir dengan pangkat terakhir kapten, kemudian memilih mengabdikan diri membangun desanya dan kemudian menjadi lurah di sana.

Perjalanan kreatif Rabernir di bidang seni, terutama fotografi dan film, memang agak unik. Pendidikan dasar hingga menengah diselesaikan di Gombong, Jawa Tengah. Setamat SMA Negeri 1 Gombong 1995, melanjutkan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta, jurusan manajemen. Setelah berjalan selama dua tahun, dia merasa ada yang ganjil pada dirinya, karena tidak cocok belajar di bidang ekonomi. “Rasanya *kok* tidak ada perubahan pada diri saya selama dua tahun belajar waktu itu,” tuturnya.

Karena sejak SMP sudah mengenal dan suka pada seni fotografi, maka dari UPN dia “cabut” diri untuk pindah ke ISI Yogyakarta. Bahkan sebelum ke ISI, pernah pula kuliah di Modern School of Desain (MSD). Tapi hanya sebentar. Di ISI, masa pendidikannya memang ditempuh cukup lama, mulai dari 1998 dan lulus tahun 2007, dari Fakultas Seni Media Rekam jurusan Fotografi.

Ihwal pergaulannya dengan kamera, secara tidak sadar ternyata sudah dialami sejak masa remaja. Ketika duduk di bangku SMP, sang ibu membuka sebuah foto studio. Di rumahnya. Studio itu menyatu dengan toko yang dikelola sang ibu, bernama toko “Sari” di Jalan Raya Tambak, Gombong. Adalah sang ibu yang kala itu mengerjakan segala



hal di studio kecil itu. Mulai dari memotret, memproses film sendiri, jika hitam putih atau mengirimkannya ke studio lain jika film yang digunakan berwarna. Kamera *single lens reflex* (SLR) *Yashica* manual milik sang ibu adalah kamera pertama yang dipegang dan digunakan Rabernir untuk bereksperimen. “Sebenarnya waktu itu juga mencuri-curi, karena ibu sering melarang. Benda itu *kan* untuk kerja,” tambah lelaki yang saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Program Studi Kajian Budaya Media, itu.

Titik balik perjalanan hidupnya yang kemudian memantapkan pada pilihan profesi, terjadi pada 1998. Saat itu dia memotret peristiwa demonstrasi jelang runtuhnya rezim Orde Baru. Pada waktu itu, dengan kamera FM2 Nikon yang pinjaman dari dosen di ISI, dia mengabadikan aksi demo di bundaran pintu gerbang kampus UGM yang berakhir rusuh, berdarah dan tentu saja bersejarah itu.

Hasil bidikannya itu kemudian dipamerkan. Ternyata, foto karya Rabernir menarik perhatian Karen Strassler PhD, peneliti dari Harvard University, Amerika Serikat. Berkat Karen Strassler, yang saat itu sedang meneliti Indonesia sebelum dan sesudah jatuhnya rezim Orba, maka foto itu pun mendunia setelah kemudian dimuat di majalah *Asia Week* pada tahun 1999.

Begitulah seterusnya, seakan tak pernah lelah Rabernir menjelajah dunia fotografi. Kemajuan teknologi tak lepas pula dia ikuti. Munculnya kamera digital juga dia akrabi sejak tahun 2000. Tapi, “Kamera digital pertama yang saya miliki dan beli sendiri, baru terjadi pada tahun 2007. *Nikon* paling murah, seharga lima juta rupiah,” tambah pria yang pernah mendapat *grant* dalam program kerjasama 12 LSM, termasuk LP3Y tergabung dalam Jaringan Ford Foundation untuk Program Rehabilitasi Pasca Gempa di Bantul 2007-2008 itu. Dalam *project* itu, film dokumenter karyanya antara lain *Demit Ora nDulit* dan *Serpihan Hati* yang berkisah tentang kehidupan warga di beberapa dusun di Bantul, pasca terjadinya gempa.

Kini, selain masih tetap disibukkan dengan kamera untuk karya kreatifnya. Ia juga harus membagi waktu untuk menyelesaikan studinya. Dan mulai Mei 2010, dia kembali terlibat dalam program kolaborasi LP3Y-IDE-ASSPUK, untuk kegiatan di Bantul, dengan dukungan Ford Foundation. Ia akan banyak menularkan ilmu pembuatan film dokumenter kepada warga di beberapa desa di Bantul. Si Rabu-September-Marinir itu pun terus berproses.* (*awd*)